

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian serta pembahasan diatas yang terkait dengan Evaluasi Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota di Kota Batam. Maka peneliti mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Provinsi Kepulauan Riau dimana memiliki ruas Panjang jalan Negara yaitu 160,20 km dan Panjang jalan provinsi 112, 35 km, dan Panjang jalan Kabupaten/ Kota yaitu 646, 16 km, dan adapun total Panjang jalan keseluruhan Kepulauan riau yaitu 918. 71 km. Yang dimana telah ditentukan pada peraturan Wali Kota Batam Nomor 32 Tahun 2022 pasal 10 mengatakan Sub koordinator urusan jalan melaksanakan penyelenggaraan, penyusunan sistem jaringan jalan, dan penyelenggaraan pada penanganan jalan, merancang dan melaksanakan kebijakan teknis jalan, serta melaksanakan monitoring, evaluasi, dan Menyusun pelaporan tugas serta kegiatan urusan jalan.
2. Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan suatu kebijakan yang telah dibuat, maka dengan demikian untuk memastikan dari kebijakan yang telah dibuat maka perlu ada evaluasi kebijakan pemeliharaan jalan Kota di Kota Batam, dimana bertujuan mengetahui dan apakah kebijakan tersebut sudah terlaksana dengan baik atau tidak serta untuk memastikan efektivitasnya.
3. Evaluasi kinerja untuk Sumber Daya Aparatur di Dinas Bina Marga yaitu dengan menggunakan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEK BATAM).

Dan untuk proses pada perencanaan pemeliharaan jalan yaitu melibatkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) yang isinya yaitu membahas tingkatan, dengan partisipi masyarakat, Pemko Batam dan DPRD. dan untuk kualitas sarana, prasarana, dan teknologi di Dinas Bina Marga dalam pemeliharaan jalan kota di Kota Batam sudah cukup dan memadai dan juga sudah dikalibrasi sebelum pemakiannya. Anggaran untuk pemeliharaan jalan yaitu sudah memadai dan disusun dengan melalui Musrenbang dan kemudian disetujui oleh Pemko Batam dan DPRD. Kemudian untuk evaluasi pemeliharaan jalan yaitu dengan menggunakan data yaitu dengan Survei Dificiency Indek (SDI) yang bertujuan untuk memastikan efektivitas pengelolaan pemeliharaan jalan Kota di Kota Batam, kemudian dukungan masyarakat, serta pemangku kepentingan juga dalam mendorong pada akuntabilitas Dinas Bina Marga dalam pemeliharaan jalan Kota di Kota Batam dan untuk proses pada perencanaan pemeliharaan jalan yaitu melibatkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) yang isinya yaitu membahas tingkatan dengan partisipasi masyarakat, Pemko Batam dan DPRD.

4. Untuk kualitas sarana, prasarana, dan teknologi di Dinas Bina Marga dalam pemeliharaan jalan kota di Kota Batam sudah cukup dan memadai dan juga sudah dikalibrasi sebelum pemakiannya.
5. Anggaran untuk pemeliharaan jalan yaitu sudah memadai dan disusun dengan melalui Musrenbang dan kemudian disetujui oleh Pemko Batam dan DPRD.

6. Kemudian untuk evaluasi pemeliharaan jalan yaitu dengan menggunakan data yaitu dengan Survei Deficiency Index (SDI) yang bertujuan untuk memastikan efektivitas pengelolaan pemeliharaan jalan Kota di Kota Batam,
7. Kemudian dukungan masyarakat, serta pemangku kepentingan juga dalam mendorong pada akuntabilitas Dinas Bina Marga dalam pemeliharaan jalan Kota di Kota Batam.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan diatas yaitu terkait dengan Evaluasi Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota Di Kota Batam. Dan maka dengan demikian peneliti menyarankan:

1. Berkaitan dengan evaluasi kebijakan pemeliharaan jalan Kota di Kota Batam maka untuk meningkatkan kompetensi pegawai Dinas Bina Marga harus melalui pelatihan berkala, supaya mereka tetap memiliki keterampilan yang diperlukan pada pemeliharaan jalan.
2. Dalam keterlibatan masyarakat harus memperkuat partisipasi masyarakat dalam musrenbang yang dimana untuk memastikan usulan dan aspirasi mereka benar- benar dalam perencanaan pemeliharaan jalan.
3. Transparansi anggaran dimana Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, harus menyediakan transparansi pada penggunaan anggaran pemeliharaan jalan yaitu dengan adanya laporan ke publik dengan rinci, supaya masyarakat serta pemangku kepentingan dapat melihat alokasi dan penggunaan dana.

4. Menyusun strategi pengelolaan risiko yang efektif dimana untuk mengantisipasi serta mengatasi dengan adanya biaya yang tak terduga dimana akibat kerusakan jalan yang lebih parah dari perkiraan awal.
5. Membentuk mekanisme yaitu umpan balik kepada masyarakat, serta memberikan tanggapan langsung mengenai kondisi jalan serta kualitas pada pemeliharaan jalan kota di Kota Batam.